



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki sejumlah kesamaan dengan penelitian penulis. Penulis memilih tiga buah penelitian terdahulu sebagai acuan pembuatan penelitian terkait sejumlah aspek, antara lain topik, konsep dan metodologi.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi tahun 2018 berjudul Analisis Penerapan Jurnalisme Damai di Media Daring Tirto.Id dalam Pemberitaan Konflik Etnis Rohingya dan Militer Myanmar yang disusun oleh Audy Bernadus dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan konflik di media. Konflik menjadi salah satu nilai berita, sehingga keberadaannya selalu ditemui di dalam konten media. Konsekuensinya, media mempengaruhi proses berjalannya konflik. Di satu sisi, media berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik jika pemberitaan membawa pesan-pesan toleransi dan meredam kebencian. Namun di sisi lain, media juga bisa memperkeruh konflik jika pemberitaan cenderung mendukung salah satu pihak berkonflik dan membawa pesan-pesan yang memprovokasi sehingga kedua pihak semakin saling membenci.

Penelitian ini kemudian menetapkan fenomena empirik berupa konflik antar etnis Rohingya dan militer di Myanmar, sebagai salah satu konflik yang menyita perhatian di seluruh dunia. Konflik ini berlangsung pada abad ke delapan ketika orang-orang dengan etnis Rohingya dari Asia Selatan ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Myanmar, lalu mendirikan kerajaan di Arakan yang saat ini bernama Rakhine. Pada tahun 1784, Raja Burma berhasil menaklukan Arakan. Penaklukan tersebut akhirnya mewariskan permusuhan antara kelompok etnis Rohingya dengan Burma hingga saat ini. Hingga pada tahun 1982, pemerintah Burma menetapkan kelompok etnis Rohingya sebagai imigran ilegal. Bahkan, pada 1989, ketika Burma berubah nama menjadi Myanmar, kelompok etnis Rohingya tidak kunjung memperoleh pengakuan. Pada tahun 1991, lebih dari 250.000 individu etnis Rohingya mengungsi ke wilayah yang saat ini dikenal sebagai India dan Bangladesh untuk menghindari penyiksaan, kerja paksa dan pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Namun pada 1992 hingga 1997, militer Myanmar mengadakan perjanjian repatriasi yang berujung pada kembalinya sekitar 230.000 individu etnis Rohingya ke wilayah Myanmar, tepatnya di wilayah Rakhine. Tetapi, meskipun sudah tinggal bersama penduduk Myanmar, kelompok etnis Rohingya tetap tidak memperoleh pengakuan. Lantas kelompok etnis Rohingya kemudian melakukan pembalasan terhadap militer Myanmar melalui Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Akhirnya, sejak tahun 2016, terus terjadi persetujuan antara ARSA dengan militer Myanmar yang membuat gelombang pengungsian kelompok etnis Rohingya ke Banglades terjadi kembali. Karena

lambat laun keberadaan kelompok etnis Rohingya menghabiskan sumber daya nasional Bangladesh, tarik ulur antara pemerintah Bangladesh dengan militer Myanmar pun terjadi dan turut melengkapi konflik.

Penulis dari penelitian terdahulu ini menyadari bahwa media Indonesia sebagai pihak ketiga di luar lingkaran konflik perlu untuk membawa konflik Rohingya-Myanmar menuju perdamaian agar tidak turut membawa masalah di Indonesia. Media di Indonesia perlu menciptakan pemahaman yang benar bagi masyarakat dalam negeri tentang peran militer Myanmar, etnis Rohingya dan pemerintah Bangladesh. Terlebih, media di Indonesia telah turut memberitakan konflik ini, tidak terkecuali media daring Tirto.id. Penelitian terdahulu ini kemudian mencari tahu sejauh mana media daring Tirto.id berkontribusi membawa pesan-pesan perdamaian ketika memberitakan konflik Rohingya-Myanmar.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan analisis peliputan Tirto.id terhadap konflik tersebut berdasarkan empat prinsip praktik jurnalisme damai yang diperkenalkan oleh profesor perdamaian bernama Johan Galtung, yakni berorientasi pada perdamaian, berorientasi pada masyarakat, berorientasi pada kebenaran dan berorientasi resolusi.

Penelitian terdahulu ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma pospositivistik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengamatan perilaku (observasi) terhadap para informan yang dibagi menjadi dua pihak, yakni kelompok pembuat kebijakan redaksi Tirto.id

yang diwakili oleh Fahri Salam sebagai editor, serta kelompok pelaksana kebijakan redaksi Tirto.id yang diwakili oleh Restu Diantina Putri dan Aqwam Fiazmi Hanifan sebagai reporter.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menyimpulkan media Tirto.id secara garis besar telah memenuhi prinsip jurnalisme damai ketika memproduksi pemberitaan tentang konflik Rohingya-Myanmar. Pemberitaan Tirto.id sejalan dengan prinsip berorientasi pada perdamaian karena tidak berfokus pada kekerasan melainkan menjelaskan penyebab dan akibat dari konflik Rohingya-Myanmar. Namun, prinsip berorientasi pada kebenaran hanya relevan dengan sebagian kecil pemberitaan Tirto.id. Terdapat beberapa pemberitaan yang menggunakan diksi berlebihan untuk memaknai salah satu pihak berkonflik, seperti “militant”, “teroris”. Tirto.id juga menggunakan istilah tertentu seperti “pembantaian”, serta menyematkan identitas agama, seperti “muslim”. Namun, beberapa pemberitaan lain tetap menganut diksi yang sesuai, seperti *Tatmadwa* dan *Baghi* yang merupakan sebutan lokal untuk militer Myanmar dan kelompok etnis Rohingya. Sayangnya kebenaran dalam pemberitaan Tirto.id nampak tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang berkonflik, karena media tersebut tidak berupaya untuk membongkar keburukan dari militer Myanmar atau pun kelompok etnis Rohingya sekaligus. Hal tersebut ditunjukkan dari sebagian besar pemberitaan berfokus pada penderitaan kelompok etnis Rohingya, sehingga cenderung membingkai bahwa militer Myanmar adalah pihak yang sepenuhnya bersalah.

Kemudian, pemberitaan Tirto.id juga sejalan dengan prinsip berorientasi pada masyarakat, karena tidak berfokus pada narasi elit pimpinan dari militer Myanmar maupun kelompok etnis Rohingya, melainkan juga memberi ruang bagi sumber-sumber alternatif. Dalam pemberitaan Tirto.id, sumber alternatif tersebut sebagian besar adalah organisasi kemanusiaan yang menyuarakan perdamaian, seperti *Human Right Watch*, *Medecins Sans Frontieres*, *Burma Human Rights Network*, *Amnesty International*, dan *International Crisis Group*. Selain itu, penerapan prinsip tersebut juga diwujudkan dalam bentuk insiatif Tirto.id untuk lebih banyak menyorot korban terdampak konflik. Sayangnya, korban serangan Militer Myanmar lebih mendapatkan sorotan dibandingkan korban serangan ARSA dari kelompok etnis Rohingya. Ada pun dalam prinsip terakhir yakni berorientasi pada resolusi, pemberitaan Tirto.id sudah mengarah pada penawasan solusi, baik terkait permasalahan di dalam lingkaran konflik maupun terkait permasalahan di luar lingkaran konflik.

Penelitian terdahulu ini relevan dengan penelitian penulis karena memiliki kesamaan topik, masalah dan konsep. Penerapan metode studi kasus pendekatan kualitatif yang digunakan di dalam penelitian terdahulu ini juga akan menjadi panduan bagi penulis dalam mengolah data sekunder.

Penelitian terdahulu yang berikutnya merupakan jurnal penelitian non-akademis berjudul *Jurnalisme Perang vs Jurnalisme Damai* yang disusun oleh Agus Sudiby. Jurnal ini merupakan bagian dari buku *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (2001, p. 149-158). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan media yang selalu menerapkan *framing* ketika melaporkan suatu

peristiwa. *Framing* terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk mengabaikan dan menonjolkan dimensi-dimensi tertentu dari tumpukan fakta, dan kemudian menciptakan konstruksi makna yang spesifik dari sebuah realitas peristiwa. Lazimnya, praktik *framing* dilakukan dengan sejumlah cara, antara lain seperti menyeleksi sumber berita, menyaring pernyataan narasumber, hingga mengutamakan penggunaan perspektif tertentu dalam menginterpretasikan peristiwa. *Framing* membuat satu fakta dapat memperoleh penggambaran yang berbeda-beda antara satu media dengan media lainnya.

Demikian juga ketika melakukan peliputan terhadap peristiwa konflik, setiap media memiliki corak kerjanya masing-masing, sehingga menghasilkan cerita yang juga berbeda-beda terhadap satu peristiwa konflik. Namun, hal yang disayangkan adalah seringkali media memberikan citra dan gambaran yang bertolakbelakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya berlaku di lapangan. Penelitian terdahulu ini kemudian menganalisis konten pemberitaan konflik di empat media surat kabar, yakni Suara pembaruan, Kompas, Republika, dan Media Indonesia tentang suatu peristiwa konflik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi arah kecenderungan *framing* dari setiap media tersebut dalam memberitakan satu peristiwa konflik yang sama. Hasil analisisnya kemudian dikaitkan dengan prinsip jurnalisme damai.

Peristiwa konflik diteliti dalam penelitian terdahulu ini adalah penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon yang cukup memperoleh banyak perhatian masyarakat internasional. Di dalam penelitian terdahulu ini, dijelaskan bahwa peristiwa tersebut menandai itikad baik Israel untuk mengakhiri pendudukan di

wilayah Lebanon, sekaligus menjadi awal dimulainya penyelesaian konflik Arab-Israel. Dengan demikian, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon ini bisa menjadi fajar perdamaian di Timur Tengah.

Analisis dilakukan dengan menetapkan unit-unit analisis tertentu yang relevan untuk menggamabarkan framing masing-masing keempat media tadi dalam memberitakan peristiwa penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Unit-unit analisis tersebut antara lain Sumber Berita, Sumber Liputan, Bingkai Berita dan Prasangka Berita. Hasil analisis membuktikan bahwa tidak terdapat teknik jurnalistik baku yang diterapkan bersamaan. Baik Suara Pembaruan, Kompas, Republika, maupun Media Indonesia, semuanya memiliki kecenderungannya masing-masing dalam memaknai dan merepresentasikan peristiwa penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

Untuk unit sumber berita, sebagian besar dari media-media tersebut memiliki kesamaan sumber dalam memperoleh fakta. Media suara Pembaruan dan media Kompas memilih sumber pemberitaan dari pihak Israel, sedangkan media Republika memilih sumber pemberitaan dari kedua pihak berkonflik yakni Israel dan Lebanon. Ada pun Media Indonesia menjadi satu-satunya yang secara lengkap mengambil sumber pemberitaan dari pihak Arab, pihak Israel dan pihak pengamat netral sekaligus.

Kemudian, untuk unit sumber liputan, masing-masing dari setiap media mengandalkan sumber peliputan dari kantor berita internasional. Kantor berita Reuters diandalkan oleh media Suara Pembaruan, sedangkan kantor berita

Agence France Presse (AFP) diandalkan oleh media Kompas dan media Media Indonesia. Di antara keempat media, hanya media Republika yang memadukan sumber peliputan Reuters dan AFP sekaligus, yang kemudian masih dipadukan dengan sumber peliputan pekerja media sendiri.

Selanjutnya, untuk unit bingkai berita, terbukti pemberitaan dari masing-masing media memiliki perbedaan kecenderungan satu sama lain. Pemberitaan media Suara Pembaruan membingkai bahwa pihak Suriah, Hizbullah, Iran dan Palestina sebagai teroris yang anarkis dan destruktif. Sedangkan untuk pihak Israel, di media yang sama, dibingkai sebagai pemegang otoritas wilayah Timur Tengah. Sementara itu, pemberitaan media Kompas membingkai bahwa Israel telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atas nasib Tentara Lebanon Selasa (SLA) dan Hizbullah. Sedangkan pemberitaan milik Media Indonesia membingkai kedua pihak berkonflik sama-sama sebagai peraih kemenangan. Ada pun pemberitaan media Republika membingkai bahwa penarikan pasukan Israel adalah sesuatu yang memalukan, mirip kekalahan Amerika dalam perang Vietnam dan kekalahan Afganistan dalam perang Rusia.

Terakhir, untuk unit prasangka media, masing-masing dari keempat media juga memiliki kecenderungan yang berbeda satu sama lain. Pemberitaan media Suara pembaruan mengandung prasangka bahwa Hizbullah, Iran dan Suriah adalah teroris pengganggu stabilitas. Sedangkan pemberitaan media Kompas mengandung prasangka bawa Israel begitu bijaksana dan bertanggungjawab dalam membantu menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ada pun pemberitaan media Republika mengandung prasangka bahwa pihak Isarel tidak

lebih sebagai aneksator (pengambil wilayah pihak lain secara paksa untuk disatukan dengan wilayah sendiri) dan aggressor (penyerang wilayah pihak lain untuk tujuan kekuasaan).

Berdasarkan rangkaian hasil analisis tersebut, penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa kecenderungan *framing* dari media Media Indonesia lebih menunjukkan prinsip jurnalisme damai, sedangkan kecenderungan *framing* dari media Kompas dan Suara Pembaruan lebih menunjukkan prinsip jurnalisme perang. Ada pun media Republika terlihat menyediakan ruang bagi penerapan jurnalisme damai dan perang sekaligus.

Penelitian terdahulu ini juga memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Selain dalam aspek topik, penelitian terdahulu ini juga meneliti menyinggung konsep teoritik perilaku media yang selalu menyeleksi dan membingkai fakta terhadap realitas peristiwa konflik.

Penelitian terdahulu terakhir merupakan jurnal penelitian rangkuman skripsi tahun 2017 berjudul Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Pembakaran Gereja di Aceh Singkil pada Harian Waspada yang disusun oleh Raihan Nusyur dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Aceh. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya peran media sebagai penyumbang informasi terbesar yang membuatnya selalu giat melayani kebutuhan publik akan informasi. Dalam menjalankan peran tersebut, media tidak hanya memainkan fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga fungsi ideologis untuk membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa. Demikian juga ketika memberitakan peristiwa konflik, media punya

peran penting dalam menentukan bagaimana suatu konflik akan dipahami dan dimaknai oleh masyarakat. Media seringkali membuat kesalahan dengan terlalu membesar-besarkan realitas konflik, sehingga memicu datangnya konflik baru. Namun, hal yang sebaliknya juga bisa berlaku, dimana pemberitaan menggiring konflik pada kemungkinan resolusi dengan membuka jalan damai antara kedua pihak yang sedang bertikai.

Penelitian terdahulu ini kemudian mengambil peristiwa kerusuhan pasca aksi pembakaran gereja oleh massa di Aceh Singkil pada tahun 2015 yang lalu. Konflik ini bermula ketika kelompok yang menamakan diri sebagai Pemuda Peduli Islam (PPI) melakukan aksi pembakaran gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Gunung Meria yang berlokasi di desa Suka Makmur, Aceh Singkil. Diketahui aksi pembakaran tersebut dilakukan karena persoalan ketiadaan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam pembangunan gereja yang dilakukan oleh kelompok minoritas di daerah tersebut, yakni kelompok Nasrani. Penelitian ini menjelaskan, konflik serupa juga pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1979 di Aceh Singkil. Kala itu konflik juga dipicu oleh persoalan yang tidak berbeda, yakni pendirian rumah ibadah Nasrani yang tidak memenuhi izin mendirikan bangunan. Konflik tersebut diselesaikan pada tahun 2001 melalui kesepakatan antara masyarakat Muslim dengan tokoh agama Nasrani tentang pendirian satu gereja di setiap satu desa. Namun, setelah itu protes dari umat Muslim tetap terus muncul karena kesepakatan tidak berjalan semestinya, dimana pembangunan rumah ibadah Nasrani terus saja tumbuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dari penelitian terdahulu ini kemudian menyadari adanya peran strategis media-media lokal daerah Aceh Singkil yang termasuk wilayah rawan konflik antar agama. Peran tersebut bisa terwujud dalam perilaku produksi pemberitaan yang sensitif dan memperburuk konflik atau produksi pemberitaan yang mampu memediasi kedua belah pihak guna menciptakan kerukunan umat beragama di Aceh.

Salah satu media lokal yang cukup mengambil andil dalam melaporkan konflik umat beragama di Aceh adalah media surat kabar Harian Waspada. Peneliti dari penelitian terdahulu ini kemudian memilih Harian Waspada sebagai subjek penelitian. Harian Waspada adalah media massa konvensional yang terbit secara periodik setiap satu hari. Penelitian ini juga menjelaskan, surat kabar yang berdiri sejak 1947 tersebut adalah media massa lokal Sumatera Utara yang tertua sekaligus memiliki lingkup pasar yang menjangkau hampir seluruh penduduk dengan beragam agama di Sumatera Utara termasuk Aceh.

Lebih lanjut, sama seperti penelitian terdahulu yang pertama, penelitian terdahulu ini kemudian mencari tahu sejauh mana media -dalam hal ini adalah media lokal Harian Waspada- berkontribusi membawa konflik agama di Aceh menuju penyelesaian dan perdamaian. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian terdahulu ini turut melakukan analisis dengan mengacu pada prinsip praktik jurnalisme damai, namun dengan perbedaan metode. Jika penelitian terdahulu pertama menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, penelitian terdahulu ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif.

Analisis isi dilakukan terhadap 17 buah teks berita sepanjang periode 12 hingga 26 Oktober 2015, untuk mengukur apakah gaya dan etika penulisan berita yang diterapkan oleh Harian Waspada sejalan dengan empat prinsip jurnalisme damai, antara lain berorientasi pada perdamaian, berorientasi pada masyarakat, berorientasi pada kebenaran, dan berorientasi pada resolusi. Selain menggunakan prinsip jurnalisme damai sebagai konsep utama, penelitian terdahulu ini juga menggunakan tiga dari lima tahapan konflik menurut Fischer, yakni krisis, akibat dan pascakonflik. Pandangan Fischer dimanfaatkan sebagai landasan dalam menetapkan sampel pemberitaan yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara statistik dengan menghitung frekuensi kemunculan unit analisis melalui teknik tabulasi tunggal dan tabulasi silang.

Penelitian terdahulu ini menyimpulkan sebagian besar isi pemberitaan konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil milik Harian Waspada sejalan dengan keempat prinsip jurnalisme damai. Hasil analisis tabulasi tunggal menunjukkan “berorientasi pada perdamaian” menjadi prinsip paling dominan yang dianut oleh pemberitaan, dengan frekuensi kemunculan yakni sebanyak 74 kali atau 56,6 persen. Sedangkan indikator dengan frekuensi kemunculan terbesar adalah “melihat konflik sebagai permasalahan”, yakni sebanyak 15 kali atau 11,5 persen. Ada pun analisis tabulasi silang menunjukkan pemberitaan paling dominan berada pada tahap pascakonflik, dengan frekuensi kemunculan yakni sebanyak 93 kali atau 71%. Kemudian, “berorientasi pada perdamaian” menjadi prinsip paling banyak yang dianut oleh pemberitaan di tahap pascakonflik, dengan frekuensi kemunculan sebanyak 51 kali atau 38,8%.

Selain dari aspek topik dan konsep, penelitian terdahulu ini juga memiliki kesamaan terkait aspek lainnya dalam penelitian penulis, yakni metodologi. Penelitian terdahulu ini akan menjadi gambaran awal bagi penulis untuk memahami dan melakukan metode analisis isi pendekatan kuantitatif sebagai salah satu bagian dari metode kombinasi dalam penelitian penulis.

2.2. Konsep

2.2.1. *New Media dan Jurnalisme Online*

Perkembangan *new media* merujuk kepada sebuah peran teknologi dalam mengubah alur produksi, distribusi dan konsumsi informasi yang tadinya terbatas oleh ruang dan waktu menjadi tidak terbatas. Media baru menurut Lister (2003) memiliki sejumlah karakteristik, antara lain 1) *digitality*; penyajian dan penerimaan kontennya berlangsung secara terdigitalisasi lewat medium gawai, 2) *dispersal*; menawarkan produksi dan distribusi konten yang terdesentralisasi, sehingga memungkinkan keaktifan serta kebebasan individu dalam menggunakan media, dan 3) *interactivity*; adanya kesempatan bagi pengguna untuk memberikan umpan balik sesegera mungkin (Hadi, 2009, p. 70).

Kehadiran *new media* juga tidak terlepas dari hadirnya fenomena baru yang oleh Holmes disebut sebagai *second media age*, yang secara konseptual digambarkan sebagai kepergian dominasi bentuk-bentuk media *broadcast* (surat kabar, radio dan televisi). Perayaan atas *second*

media age didasarkan pada meningkatnya media interaktif, terutama internet, dan menurunnya siaran televisi (Holmes, 2005, p. 08). James Carey (1995) mengatakan kelahiran *second media age* juga merupakan bagian dari upaya umat manusia pada abad ke-19 untuk mempercepat sirkulasi pengiriman pesan (Holmes, 2005, p. 97).

Adapun jurnalisme merupakan kegiatan atau keterampilan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi menjadi produk berita yang menarik, penting dan aktual bagi masyarakat. Wartawan adalah individu yang menjalankan kerja jurnalisme untuk memenuhi kebutuhan publik atas informasi melalui lima fungsi, yakni mengabarkan, mendidik, membimbing, mempengaruhi, dan menghibur (Yuniati & Rachmiate, 2009, p. 58). Berita tidak sama dengan informasi. Berita adalah informasi yang memenuhi elemen tertentu. Dalam aspek penulisan, elemen yang dimaksud adalah kelengkapan unsur *what, when, where, who, why* dan *how*. Dalam segi pengolahan, berita harus memenuhi konfirmasi dan verifikasi. Dalam segi metode pengumpulan data, berita harus dibangun oleh aktivitas wawancara, observasi, partisipasi peristiwa, hingga riset dokumen (Eddyono, 2013, pp. 51-52).

Kehadiran *new media* berupa teknologi internet adalah pemicu terbesar lahirnya jurnalisme *online*. Perkembangan jurnalisme *online*, menurut Pavlik (1998), selalu diawali dari media cetak yang hanya memindahkan konten cetaknya ke dalam bentuk *online*, sebelum

akhirnya industri media menyajikan informasi secara khusus untuk halaman *web* (Hadi, 2009, p. 74). Perjalanan yang sama pun juga berlaku dalam catatan perkembangan media *online* di Indonesia.

Didorong oleh kehadiran Indonet sebagai jasa layanan internet pertama di Indonesia, pada tahun 1994 Republika menjadi media pertama yang menjajaki ranah internet. Dua tahun kemudian, pada 1996 Tempo yang mengalami pembredelan turut mencoba pertarungan di dunia internet dengan mendirikan Tempo interaktif. Di tahun yang sama, Bisnis Indonesia juga meluncurkan *website* pertamanya. Kompas baru menyusul satu tahun kemudian, pada 1997. Seluruh media *online* generasi pertama tersebut menerapkan operasional yang sederhana, yakni hanya memindahkan konten cetak ke *website* menjadi konten digital. Baru pada 1998, konten khusus jurnalisme *online* pertama kali diperkenalkan oleh Detik (Heru & Syaefullah, 2012, pp. 15-17).

Unsur utama yang membangun praktik jurnalisme *online* adalah konvergensi media. Konsep konvergensi media mewujud dalam bentuk penggabungan teknologi cetak, televisi, telepon, dan komputer (Boczkowski, 2004, dalam Askia, 2015, p. 43) untuk menghasilkan berita dalam berbagai bentuk, yakni teks, video, gambar, suara, animasi (Bardoel & Deuze, 2001; Saltiz & Dickinson, 2007, dalam Adzkia, 2015, p. 43).

Konvergensi media kemudian turut menciptakan pola kerja baru yang menuntut wartawan untuk mengoptimalkan semua keterampilan menggunakan teknologi komunikasi dalam satu kali reportase, demi bisa menghasilkan format-format berita tersebut (Saltiz & Dickinson, 2007, dalam Azkia, p. 44).

2.2.2. Konflik

Konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung dengan objek konflik, serta menggunakan pola perilaku atau interaksi yang menghasilkan keluaran konflik. Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin “*configure*” yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi kedalam bahasa Inggris, “*conflict*” yang diadopsi lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” (Tjabolo, 2017, pp. 8-9). Konflik juga didefinisikan sebagai kondisi adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan satu sama lain dalam hal pikiran, perasaan, tindakan dalam mencapai tujuan yang sama (Sukardi, 2016, pp. 78 & 81).

Secara umum, konflik disebabkan oleh perbedaan karakteristik manusia, yakni dalam hal kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, kepribadian, dan kebutuhan. Konflik dapat terjadi apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga mengarah pada pertentangan di antara individu atau kelompok

(Tjabolo, 2017, pp. 12-13). Berikut adalah kondisi-kondisi objektif yang dapat mendorong terjadinya konflik di masyarakat (Tjabolo, 2017, pp. 15-23).

- 1) *Keterbatasan sumber daya*. Manusia selalu memerlukan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk mendukung kepentingannya. Keterbatasan tersebut memicu kompetisi antara manusia, dimana manusia harus untuk memperebutkan sumber daya dari manusia lain. Perebutan ini seringkali berujung pada konflik.
- 2) *Perbedaan tujuan*. Konflik dapat terjadi karena pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan yang berbeda, atau memiliki tujuan yang sama namun dengan cara penyampaian yang berbeda.
- 3) *Masalah komunikasi*: Konflik bisa ditimbulkan oleh faktor-faktor penghambat komunikasi, antara lain distorsi pesan, keterbatasan informasi, dan pemakaian bahasa yang tidak dipahami. Hambatan tersebut terkadang mengakibatkan sebuah perilaku komunikasi dimaknai sebagai serangan terhadap salah satu pihak.
- 4) *Pelanggaran hukum*. Konflik bisa terjadi karena terdapat satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga membuat pihak yang menjadi korban pelanggaran meresponnya dengan perlawanan.
- 5) *Keberagaman sosial*. Konflik bisa ditimbulkan oleh identitas sosial yang beragam di antara anggota masyarakat, seperti suku,

agama, ideologi, dan preferensi politik. Pihak tertentu seringkali mengeksklusifkan identitas sosial pihak lain, lalu menyebabkan perselisihan.

- 6) *Dorongan pribadi*. Komunitas masyarakat terdiri dari anggota-anggota dengan kepribadian yang beragam, tidak terkecuali kepribadian yang dapat menyulut konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif, egois, sombong, merasa paling benar, kurang bisa mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Kepribadian tersebut lahir karena perbedaan persepsi individu mengenai suatu hal.
- 7) *Perbedaan kebutuhan*. Setiap anggota masyarakat juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Konflik terjadi apabila kebutuhan satu pihak diabaikan atau terlambat terpenuhi akibat jumlahnya yang terbatas.
- 8) *Perasaan dan emosi*. Konflik dapat dipicu oleh perilaku individu atau kelompok tertentu yang terlalu mudah mengikuti perasaan dan emosinya (irasional) ketika berinteraksi di masyarakat.

Menurut Fisher (2000) konflik mengalami perubahan setiap saat, melewati berbagai tahap aktivitas dengan intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda-beda. Berikut urutan tahapan perkembangan konflik, dari prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, hingga pascakonflik (Santosa, 2017, p. 203):

- 1) *Prakonflik*, adalah kondisi ditemukannya ketidaksesuaian kepentingan di antara dua pihak yang menjadi pemicu konflik.
- 2) *Konfrontasi*, berarti konflik menjadi semakin terbuka, dan mulai terlihat ketegangan hubungan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) *Krisis*, berarti ketegangan dan kekerasan terjadi dalam kondisi yang paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak yang berkonflik sulit untuk terjalin.
- 4) *Akibat*, berarti tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan agak menurun, disertai dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
- 5) *Pascakonflik*, berarti konfrontasi, dan kekerasan, serta ketegangan diakhiri dengan cara-cara tertentu, dengan tujuan untuk mengarahkan hubungan yang normal antara kedua belah pihak.

Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, karena umumnya dilakukan melalui mekanisme pengaturan konflik yang telah disepakati secara konstitusional oleh lembaga politik, pengadilan, pers dan sebagainya (Rosana, 2015, p. 225). McGoldrick & Lynch (2006) juga mengartikan konflik positif atau konflik konstruktif sebagai konflik yang dikelola secara efektif,

sehingga membuka jalan bagi perubahan (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 06). Sebaliknya, konflik negatif dapat mengancam eksistensi sistem politik karena berlangsung lewat cara non konstitusional, yakni kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi (Rosana, 2015, p. 225).

Selain itu, menurut Surbakti (1999) konflik juga dapat dibedakan berdasarkan elemen kemajemukannya, yakni horizontal dan vertikal. Konflik horizontal melibatkan kemajemukan kultural (agama, suku dan ras) dan status sosial (pekerjaan, dan pendidikan). Sedangkan konflik vertikal melibatkan kemajemukan pengetahuan, kekuasaan, dan struktur (dalam Rosana, 2015, p. 226).

Lalu, konflik juga dapat dibedakan berdasarkan bidang kehidupan, antara lain konflik ekonomi, konflik politik, dan konflik sosial. Konflik ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas (Tjabolo, 2017, p. 53). Adapun konflik politik merupakan konflik yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi politik, dan organisasi nirlaba (Tjabolo, 2017, p. 54) dan yang menyangkut kekuasaan dan wewenang (Rusdiana, 2015, p. 142). Sedangkan konflik sosial adalah konflik yang terjadi karena pertentangan antara dua kelompok dengan identitas sosial yang berbeda, seperti agama, ras, dan ideologi politik (Tjabolo, 2017, p. 53).

2.2.3. Jurnalisme Damai

Jurnalisme damai pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung pada 1970-an. Ia menganalogikan jurnalisme damai seperti jurnalisme kesehatan. Ketika melaporkan perjuangan seseorang melawan penyakit kanker yang dideritanya, tidak cukup jika pemberitaan tidak disertai dengan keterangan para ahli mengenai penyebab kanker, bagaimana pengobatan dan pencegahannya, seperti apa gaya hidup yang memicu pertumbuhan kanker, dan sebagainya. Begitu juga dengan pelaporan konflik, jurnalis harus memberikan pemahaman tentang konflik yang lebih luas (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 27).

Galtung menilai terdapat dua cara pandang terhadap suatu konflik, yakni cara pandang *high road* yang berfokus pada transformasi konflik menuju penyelesaian dan perdamaian, atau cara pandang *low road* yang berfokus pada kekerasan, perang, dan persoalan menang-kalah. Cara pandang *low road* menjadi cara pandang dominan yang diterapkan oleh media saat ini. Pemberitaan dengan cara pandang tersebut seringkali menggambarkan peristiwa konflik sebagai kompetisi arena olahraga, atau seperti membuat laporan komando militer; siapa yang unggul, siapa yang menyerah, dan menghitung kerugian hanya berdasarkan jumlah terbunuh atau terluka dari pihak yang diwakili. Galtung, lebih lanjut menyebut ini sebagai pendekatan *war journalism* (jurnalisme perang). Adapun lawan dari jurnalisme perang adalah jurnalisme damai, yang menyorot aliran konflik mengalir menuju kemungkinan perdamaian.

Jurnalisme damai ingin setiap pihak sepakat dalam satu narasi yang sama tentang bahaya dari kekerasan konflik (Galtung, 2016, p. 177). Jurnalisme damai merupakan serangkaian metode yang diterapkan oleh pekerja media untuk melihat dan memaknai konflik dengan cara yang berbeda alih-alih berfokus pada bagian kekerasan. (Lynch, 2007, p. 02).

Galtung (2016) lebih lanjut menjelaskan, dalam praktik jurnalisme damai, jurnalis membuat berita dengan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang umumnya diajukan oleh para koresponden perdamaian. (Galtung, 2016, p. 178). Jika jurnalisme perang cenderung memelihara polarisasi dan membiarkan kekerasan berlangsung, jurnalisme damai justru berusaha mendepolarisasi konflik dengan menunjukkan sisi hitam dan putih dari kedua belah pihak yang berkonflik serta fokus menyorot bagian-bagian yang dapat mendorong terwujudnya resolusi perdamaian (Galtung, 2016, p. 179).

McGoldrick menyatakan selama ini industri media, terutama di negara Barat, terlalu menempatkan diri sebagai “pelapor fakta apa adanya” dalam peliputan peristiwa konflik. Para ahli mengasumsikan perilaku tersebut tidak terlepas dari kepentingan bisnis media. Seharusnya, jurnalisme hadir sebagai pengintervensi peristiwa konflik untuk mengarahkannya pada perdamaian. Dengan kata lain, pelaporan fakta tidak berdiri sendiri, melainkan berbarengan dengan perhitungan dampak terhadap publik maupun pihak yang berkonflik (McGoldrick & Lynch, 2006, pp. 21-22).

Jurnalisme yang ideal memang mengharuskan objektivitas, yang umumnya diwujudkan melalui kehadiran jurnalis sebagai pihak bebas kepentingan. Namun, dalam konteks peliputan konflik, objektivitas bisa menjadi masalah tersendiri. Laporan milik jurnalis yang terlalu objektif hanya memberikan dokumentasi datar tentang sebuah konflik, namun menutup pilihan-pilihan tentang solusi dan penyelesaian (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 23). Obyektifitas seringkali membuat jurnalis hanya menyorot bagian-bagian fakta yang mudah diidentifikasi dari peristiwa konflik, dan membiarkan kekerasan berlangsung (Lynch, 2007, p. 27).

Pada dasarnya, jurnalisme damai ingin menekan celah antara kedua belah pihak yang berkonflik, serta membatasi penyebaran fakta-fakta yang berpotensi memperkeruh konflik (Rusdi, 2012, p. 390). Jurnalis dituntut melakukan seleksi materi pemberitaan, agar narasi yang dihadirkan mampu menjauhkan perhatian publik dari kekerasan (Mubarok, 2012, p. 188). Pemberitaan konflik yang menerapkan praktik jurnalisme damai memenuhi 4 prinsip, di antaranya berorientasi pada perdamaian, berorientasi pada masyarakat, berorientasi pada kebenaran, dan berorientasi pada resolusi.

2.2.4.1. Berorientasi pada Perdamaian

Jurnalis dan media dituntut untuk mengeksplorasi sebuah konflik dengan menerangkan masalah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa konflik. Selain itu, pemberitaan juga harus menjelaskan penyebab konflik secara transparan dalam konteks historis (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29). Artinya, jurnalis harus memetakan hubungan konflik peristiwa-peristiwa di masa lampau (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 30). Kemudian jurnalis juga diharuskan tidak terlalu berfokus pada kekerasan konflik, agar konflik tidak berkepanjangan dan mengarah pada resolusi. Akan tetapi, jurnalis harus menyorot dampak-dampak dari kekerasan tersebut, terutama dampak yang tidak terlihat, seperti efek psikologis, kerusakan budaya, hingga kerusakan aktivitas masyarakat (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29). Pemberitaan hendaknya tidak menggambarkan konflik terbatas sebagai pertempuran antara kedua belah pihak, karena hal itu membuat seolah-olah jurnalis menjadikan kemenangan salah satu pihak sebagai satu buah penyelesaian yang paling logis. Pemberitaan hendaknya menyajikan gambaran konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 30 & 31).

2.2.4.2. Berorientasi pada Masyarakat

Dalam praktik jurnalisme damai, pemberitaan media tidak diarahkan untuk menikmati keuntungan, melainkan diarahkan sebagai bentuk empati. Media dan jurnalis kemudian dituntut untuk menerjemahkan rasa empati tersebut dalam pemilihan bahasa yang sesuai (Mubarok, 2012, p. 188). Jurnalis dituntut untuk memberikan ruang suara paling luas bagi pihak-pihak yang berada di luar lingkaran konflik namun terdampak dari kekerasan konflik, seperti masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29). Suarakan rasa ketakutan yang mereka alami untuk menegaskan bahwa kerugian yang diakibatkan konflik tidak hanya berlaku bagi pihak yang berkonflik, tetapi bagi seluruh elemen masyarakat. Jurnalis lebih baik menanyakan pendapat masyarakat tentang konflik, apa yang mereka rasakan, bagaimana cara mereka bertahan di tengah konflik, apa solusi yang mereka harapkan (McGoldrick & Lynch, 2006, pp. 30-31). Media pun juga harus membiarkan masyarakat mengetahui nama pelaku, karena itu menunjukkan bahwa jurnalis menempatkan tuduhan kekerasan pada semua pihak secara adil (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 32). Dengan demikian, pemberitaan juga harus membatasi ruang bagi suara elit pemimpin dari pihak yang berkonflik (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29). Terlebih, narasi elit

seringkali bersifat emosional, memecah belah, dan menekankan perbedaan. Media juga sebaiknya tidak mendokumentasikan agenda perlawanan yang datang dari elit tersebut, seperti gencatan senjata atau upaya klaim kemenangan (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 31-32). Sebaliknya, jurnalis harus menjangkau orang bukan elit dari lingkaran konflik, untuk menggali tujuan mereka secara lebih kreatif, memperoleh keterangan lebih jelas tentang perubahan apa saja yang hendak mereka wujudkan, dan jalan apa saja yang berusaha ditempuh untuk memenuhi perubahan tersebut (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 30).

2.2.4.3. Berorientasi pada Kebenaran

Praktik jurnalisme damai berdiri di atas nama kebenaran, sehingga diharuskan menghindari perlibatan pesan-pesan yang membahayakan seperti propaganda dari pihak yang berkonflik (Santosa, 2017, p. 208). Namun, jurnalisme damai bekerja tidak seperti jurnalisme investigatif yang menggali kebenaran hanya dari salah satu pihak yang dinilai bertanggungjawab. Dalam jurnalisme damai, kebenaran adalah konsep yang berlaku bagi siapapun pihak yang berada dalam lingkaran konflik, sehingga pewarta tidak mudah terperangkap dalam kepercayaan aktor kunci (Galtung, 2016, p. 179). Dalam memberitakan konflik, jurnalis memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengemukakan permasalahan dalam sudut pandang

mereka masing-masing, sehingga tidak menciptakan bias dan keberpihakan (Santosa, 2017, p. 209). Demikian juga ketika mengungkap kebohongan, membantah tuduhan palsu, dan mencantumkan nama pelaku kekerasan atau kejahatan di dalam konflik, jurnalis hendaknya memperlakukan kedua belah pihak dengan setara. (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29). Selain itu, kesetaraan perlakuan juga diwujudkan dalam bentuk desain pemberitaan yang tidak menyalahkan salah satu pihak sebagai ancaman, agar tidak melahirkan pemahaman tentang “kita dan mereka” atau “pejahat dan korban”, karena akan menimbulkan seakan-akan menghukum salah satu pihak adalah solusi terbaik (McGoldrick & Lynch, 2006, pp. 30-31). Kemudian, jurnalis juga dituntut untuk memanusiaikan pihak-pihak yang berkonflik dengan tidak menggunakan diksi-diksi berbahaya yang bersifat *emotive*, *demonising*, dan *victimising* (McGoldrick & Lynch, 2006, pp. 31-32).

2.2.4.4. Berorientasi pada Resolusi

Jurnalis diharapkan mampu menghasilkan pemberitaan yang berfokus pada langkah-langkah yang mungkin dapat diambil untuk mendorong penyelesaian konflik. Jurnalis bisa memberikan kesempatan bagi pihak ketiga di luar lingkaran konflik yang berupaya menyuarakan penyelesaian melalui cara perdamaian. Misalnya, organisasi agen perdamaian di tingkat

akar rumput, layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), individual pemerintah, pemerhati sosial. Sebaliknya, media membatasi ruang bagi narasi perdamaian palsu yang disuarakan oleh salah satu pihak yang berkonflik (McGoldrick & Lynch, 2006, p. 29, 31).

2.2.4. Rutinitas Media

Pamela Shoemaker dan Stephen Reese (1996) memperkenalkan konsep hierarki pengaruh media, yang mengandaikan bahwa pembentukan konten oleh media tidak terlepas dari akumulasi berbagai pengaruh dari individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, ekstra media dan ideologi media (Mubarok, 2012, pp. 188-189).

Alih-alih melihat isi media sebagai sesuatu yang natural dan mencerminkan realitas objektif, Shoemaker dan Reese justru memandang bahwa isi media dibentuk oleh sejumlah faktor yang bisa menghasilkan beberapa versi yang berbeda tentang satu realitas yang sama (Krisdinanto, 2014, p. 04).

Penelitian ini lebih lanjut akan hanya berfokus pada pengaruh di level kedua, yakni rutinitas media. Menurut Mubarok (2012), pengaruh di level ini berhubungan dengan mekanisme pembentukan berita. Setiap media umumnya punya ukuran sendiri untuk mendefinisikan bagaimana karakteristik berita yang baik. Ukuran tersebut diaplikasikan dalam

rutinitas keseharian redaksi, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan kebijakan internal media (Mubarok, 2012, p. 189).

Rutinitas media merupakan respons organisasi praktis dari sebuah organisasi media terhadap kebutuhan akan sumber daya yang terbatas. Rutinitas membantu organisasi media mengoptimalkan hubungannya dengan lingkungan, sebagai proses adaptasi atas kendala-kendala yang ditemukan. Dalam batasan ruang dan waktu, media harus memikirkan cara yang efisien untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh konsumen (Shoemaker & Reese, 2014, p. 168).

Rutinitas membantu media memastikan aliran informasi di tengah segala batasan fisik, sekaligus memaksakan logika khusus tentang produk yang dihasilkan. Ia memungkinkan media agar tidak menjadi pasif atas segala rangkaian informasi yang datang dari gerbang, dengan memberikan perspektif tentang definisi berita yang layak diberitakan. Sebagai entitas yang kompleks dan rasional, media tidak mampu begitu saja mengatasi jumlah peristiwa yang tak terduga dan tak terbatas di dunia sehari-hari, sehingga memerlukan instrumen untuk mengukur apakah suatu peristiwa layak untuk diberitakan, disortir, dikategorikan, dan diklasifikasikan. Lewat rutinitasnya, organisasi media berperan dalam membangun realitas (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 181, 182).

Rutinitas dibentuk oleh tiga domain, antara lain audiens, organisasi, dan sumber. Setiap unsur harus mencapai keseimbangan tanpa ada yang terabaikan. (Shoemaker & Reese, 2014, p. 168):

1) *Audience*

Media selalu mempelajari audiens mereka. Surat kabar mengawasi sirkulasi, sedangkan televisi dan radio memperhatikan rating dan pangsa pemirsa dari program. Melalui pihak ketiga, media juga dapat memperoleh karakteristik demografis usia para penonton. Semua upaya itu memang tidak terlalu berguna dalam menentukan ukuran ideal dari konten yang diproduksi, namun cukup membantu dalam mengukur penerimaan publik atas apa yang mereka produksi (Shoemaker & Reese, 2014, p. 169).

Media juga bisa mempelajari audiens mereka lewat umpan balik. Untuk media pada masa pra-internet, umpan balik dari audiens sangat minim. Komentar pembaca yang terbit sudah dipotong, diedit, mengalami banyak perubahan. Sedangkan untuk media di era internet, interaktivitas lebih mungkin terjadi, dimana audiens dapat dengan mudah memberikan pendapat tentang konten media secara sengaja. Departemen editorial dari organisasi media akan menerima data-data komentar tersebut dan mempelajari apa yang disukai dan diinginkan audiens (Shoemaker & Reese, 2014, p. 169).

Teknologi internet juga memungkinkan organisasi media untuk menangkap informasi tentang akses audiens terhadap berita, hiburan, dan iklan, seperti waktu yang dihabiskan, jumlah klik, dan tampilan halaman untuk mengukur dimensi minat pemirsa terhadap produk. Organisasi media kemudian bisa menyoroti konten yang relevan dengan audiens mereka ; menggabungkan konten dengan preferensi pribadi dan komunal audiens yang heterogen (Shoemaker & Reese, 2014, p. 170).

Jika sudah menguasai karakteristik audiensnya, media bisa memikirkan cara yang tepat untuk menceritakan peristiwa sesuai dengan kebutuhan audiens. Narativitas memandu reporter untuk memilih fakta-fakta (tulisan dan foto) yang dimasukkan. Struktur cerita dan visual menentukan bagaimana suatu peristiwa akan dipresentasikan (Shoemaker & Reese, 2014, p. 175).

Media juga selalu menghubungkan pertimbangan audiensnya dengan nilai-nilai berita. Konsep nilai berita ini selama beberapa dekade telah membimbing kepada temuan tentang apa yang menarik dan penting untuk diketahui oleh publik (Stephen, 1980, dalam Shoemaker & Reese, 2014, p. 170). Perhatian dan minat audiens yang terbatas adalah hal yang penting dalam menciptakan kesepakatan tentang nilai-nilai berita yang dominan di media (Shoemaker & Reese, 2014, p. 171).

Media juga perlu melindungi diri dari kritik ketidakpercayaan audiens, sehingga diperlukan rutinitas yang bersifat defensif, yakni mengukur objektivitas atas berita yang dibuatnya. Objektivitas lebih merupakan serangkaian prosedur yang dijalankan untuk melindungi diri dari serangan yang dapat memalukan organisasi media, alih-alih sebagai ideologi praktik jurnalisme (Shoemaker & Reese, 2014, p. 174). Namun, objektivitas juga digunakan untuk melegitimasi berita di media. Karena organisasi media begitu besar, dimiliki secara pribadi, dan sangat terkonsentrasi, dengan banyak kekuatan media meraih dukungan publik melalui obyektivitas dan memaksimalkan daya tarik audiens (Shoemaker & Reese, 2014, p. 175).

2) *Process*

Organisasi media perlu menemukan cara untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan mentah sebelum membawanya ke bagian produksi. Sebagai sebuah institusi bisnis, level ini berguna untuk menyediakan peran dan harapan yang jelas dan terspesialisasi kepada para pekerjanya. Terlebih, setiap organisasi media bekerja dalam struktur yang bervariasi (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 178, 185).

Rutinitas media pada level *process* dapat digambarkan sebagai konferensi editorial antara para pekerja media dari berbagai tingkatan struktur untuk menentukan apa yang akan ditampilkan di halaman depan, bagaimana berita akan diceritakan, dan sebagainya. Cerita-

cerita akan dikumpulkan, dirangkum, dibandingkan, untuk membuat banyak keputusan (Shoemaker & Reese, 2014, p. 173).

Aktivitas tersebut berguna dalam mengarahkan para pekerjanya untuk mengambil dan menyusun fakta dan konteksnya sesuai dengan keinginan organisasi media (Shoemaker & Reese, 2014, p. 183). Ia memaksa awak media untuk bertahan dalam zona nyamannya, agar menerapkan pola yang sudah disepakati (Mubarok, 2012, p. 189).

Terlebih, jurnalis adalah kelompok profesi yang saling bergantung satu sama lain. Para pekerja di dalam organisasi media selalu saling berkonsultasi dan membandingkan ide-ide mereka guna memutuskan konsensus tentang bagaimana suatu peristiwa akan diceritakan. Di tahap yang ekstrem, level rutinitas ini dirancang untuk menghomogenisasi gaya pelaporan terhadap satu peristiwa tunggal (Shoemaker & Reese, 2014, p. 184).

Level ini membantu pula dalam menetapkan aturan main yang terstandarisasi, terlembagakan, dan dipahami. Karena tidak memiliki tolak ukur eksternal yang kuat tentang suatu produk, para jurnalis berusaha untuk menentukan panduan yang digunakan secara konsisten. Sebuah kebijakan berguna bagi organisasi media untuk mengurangi resiko dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan berkualitas dan benar (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 178, 185).

3) *Suppliers*

Organisasi media bergantung pada pihak eksternal yang memasok bahan baku berupa keterangan wawancara, pidato, laporan insitisi, pendapat pemerintah, dan sebagainya (Shoemaker & Reese, 2014, p. 187). Sesama profesi wartawan memiliki cara yang berbeda dalam mengakses sumber-sumbernya. Perbedaan ini akan menentukan bagaimana peristiwa digambarkan (Shoemaker & Reese, 2014, p. 185). Sumber potensial pertama bagi organisasi media adalah hubungan masyarakat dari sebuah lembaga. Hubungan masyarakat mengambil peran utama di dalam rutinitas media, dan menciptakan koneksi yang lebih sistematis antara perusahaan dengan insitisi lain. Hubungan masyarakat berkontribusi terhadap terciptanya peristiwa semu yang ditanam, diorganisir, dan memanipulasi, alih-alih datang secara alami. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa jurnalis dan hubungan masyarakat selalu berbagi nilai berita yang sama (Shoemaker & Reese, 2014, p. 188).

Pemasok berikutnya adalah saluran informasi, yang terbagi dalam saluran resmi, saluran informal, dan saluran perusahaan media. Saluran resmi mencakup siaran pers, konferensi pers, momen resmi, dan peristiwa tidak spontan lainnya. Saluran informal bisa berupa sumber non-pemerintah, laporan lembaga penelitian, dan kebocoran pemerintah. Saluran perusahaan antara lain adalah wawancara yang dilakukan atas inisiatif wartawan, peristiwa spontan yang disaksikan

di tangan pertama, dan kesimpulan atau analisis wartawan sendiri atas sebuah peristiwa (Shoemaker & Reese, 2014, p. 189).

Kemudian, organisasi media digital menjadikan internet sebagai saluran informasi untuk menemukan apa pun, penelitian independen, detail kecil dan konteks besar untuk semua topik peristiwa, hingga memeriksa apa yang dibuat oleh organisasi kompetitor (Shoemaker & Reese, 2014, p. 189).

Selanjutnya, pelaku bisnis, profesional, dan eksekutif perusahaan juga menekankan hubungannya dengan organisasi media dengan menginformasikan apa yang baru saja mereka keluarkan dan lakukan. Namun, sumber-sumber resmi tersebut bekerja lebih rahasia dengan menghimpun lebih sedikit perhatian dalam memanipulasi informasi. Tentu berbeda dengan sumber resmi pemerintah yang lebih mudah ditemukan dan dipelajari, karena mempertimbangkan akuntabilitas publik yang besar (Shoemaker & Reese, 2014, p. 189).

Sebagian konten berita dari setiap organisasi media berasal dari pernyataan sumber resmi, memuat informasi yang dikoreografikan dengan baik. Beberapa sumber resmi bahkan memberikan *briefing* sebagai strategi yang disengaja demi memenuhi kebutuhan dan mengambil kontrol lebih besar atas aliran informasi dan pertanyaan wartawan (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 189, 190).

Sumber resmi juga memungkinkan untuk bergerak sebagai anonim dan memprakarsai kebocoran informasi. Mereka adalah pejabat yang bertindak mandiri karena pertikaian intra-organisasi; mengarahkan diri pada satu reporter pada suatu waktu, sering kali secara eksklusif. Hubungan antara sumber resmi dengan organisasi media semakin erat karena kebutuhan para jurnalis akan objektivitas, dimana keterangan sumber resmi dapat memvalidasi pemberitaan (Shoemaker & Reese, 2014, p. 190).

Selanjutnya, pemasok lain yang lebih penting adalah sumber ahli. Jurnalis mengandalkan mereka untuk menempatkan peristiwa dalam konteks yang tepat. Kebutuhan akan objektivitas selalu menghalangi jurnalis untuk memberikan sudut pandang mereka secara terang-terangan, dan karenanya diperlukan sumber ahli untuk menjelaskan makna tentang peristiwa. Steel (1990) mengatakan bahwa wartawan umumnya memanggil narasumber yang sesuai dengan nilai yang ingin dikomunikasikan dalam berita untuk memperkuat keyakinan mereka sendiri dan menciptakan ilusi tujuan pelaporan. Keterangan sumber ahli dianggap bebas dari bias dan tidak memihak, dan karenanya selalu diandalkan dalam menyeimbangkan sumber lain dan melengkapi cerita (Shoemaker & Reese, 2014, p. 191).

Sumber ahli dari lembaga pemerintah bisa mengendalikan aliran informasi dengan cara menerapkan teknik pemasaran massal sebagai sebuah strategi politik. Jika tidak mampu mendikte pembentukan

berita, mereka menyoroti bagian peristiwa yang menguntungkan lalu menyediakan diri untuk bertemu dengan wartawan dan memberikan tanggapan terkoordinasi. Terlebih, para reporter selalu menghargai pertemuan karena dinilai dapat memusatkan banyak informasi dalam waktu singkat (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 192, 193).

Kantor berita dapat menjadi alternatif sumber demi membatasi pilihan-pilihan pekerja media dan mengurangi aliran informasi yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa khawatir untuk kehilangan produk berkualitas. Di tengah kendala-kendala seperti tenggat waktu, faktor geografis, menyempitnya rentang sumber yang mampu diandalkan, keberadaan kantor berita membantu organisasi media agar tetap beroperasi dengan lancar (Shoemaker & Reese, 2014, p. 181).

2.3. Alur Penelitian

Penulis menyusun alur penelitian agar pembaca mampu memahami cara kerja dari alur berpikir peneliti dalam menyusun penelitian ini, guna tercipta kesepahaman antara peneliti dengan pembaca tentang kualitas penerapan jurnalisme damai dalam teks dan produksi pemberitaan kerusuhan 22 hingga 23 Mei di media Kompas.id.

Penelitian ini berangkat dari fenomena empirik berupa peristiwa kerusuhan pascapemilu 2019 yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei 2019. Peristiwa ini menyita perhatian nasional, sehingga perkembangannya diikuti dan dilaporkan oleh semua media. Teks pemberitaan tentang kerusuhan 22 Mei milik media Kompas.id akan menjadi sebagai objek utama penelitian ini.

Teks pemberitaan media Kompas.id dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, berdasarkan variabel yang diturunkan dari konsep jurnalisme damai menurut Jake Lynch dan Annabel McGoldrick (2006) yang juga dijadikan sebagai konsep utama penelitian. Analisis isi bertujuan mengetahui sejauh mana teks pemberitaan media Kompas.id mengedepankan perdamaian dalam melaporkan peristiwa kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei. Hasil analisisnya akan menjadi data primer penelitian. Data primer tersebut kemudian akan dielaborasi kembali berdasarkan temuan data sekunder tentang rutinitas internal redaksi media Kompas.id dalam memproduksi pemberitaan kerusuhan pascapemilu 21-23 Mei 2019. Data sekunder ini dikumpulkan diolah dengan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada konsep rutinitas media dalam hierarki pengaruh media menurut Shoemaker dan Reese (2014).

Gambar 01: Alur Penelitian

